



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangli.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bangli.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
9. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

**Pasal 3**

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV  
KEGUNAAN IKU  
Pasal 6

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
  - c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB V  
PENETAPAN IKU  
Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

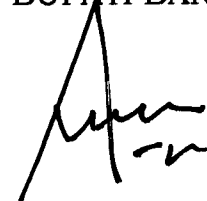
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 16 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / CARA MENGHITUNG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (Buta Aksara) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar / Angka Partisipasi Murni (APK/APM SD/MI/Paket A) dan Menurunnya Siswa Yang Putus Sekolah APK Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Siswa pada TK/RA Penitipan Anak di bagi Jumlah Anak usia 4-6 tahun di kali 100% Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis di bagi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kali 100% Jumlah siswa di jenjang SD seluruhnya di bagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun kali 100 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1	2	3	4	5
		<p>APM Sekolah Dasar (SD)</p> <p>Angka Putus Sekolah (APS) SD</p> <p>Angka Kelulusan (AL) SD</p> <p>Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP</p> <p>Meningkatnya Angka partisipasi Kasar / Angka partisipasi Murni (APK/APM SMP/MTs/Paket B) dan menurunnya siswa yang putus sekolah</p> <p>APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)</p> <p>APM Sekolah Menengah Pertama</p>	<p>Jumlah siswa di jenjang SD usia 7-12 tahun di bagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun kali 100 %</p> <p>Jumlah putus sekolah pada tingkat &amp; jenjang SD di bagi Jumlah siswa pada tingkat siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya di kali 100 %</p> <p>Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di bagi Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya di kali 100%</p> <p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP /MTS di bagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di kali 100 %</p> <p>Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/Paket B seluruhnya di bagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun di kali 100 %</p> <p>Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/Paket B seluruhnya di bagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun di kali 100 %</p>	

1	2	3	4	5
		<p>Angka Putus Sekolah (APS) SMP</p> <p>Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B</p> <p>Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/Mts/Paket B</p> <p>Meningkatnya Angka partisipasi Kasar /Angka partisipasi Murni (APK/APM SMA/MA/Paket A) dan menurunnya siswa yang putus sekolah</p> <p>APK SMA/SMK/MA/Paket C</p> <p>APM SMA/SMK/MA/Paket C</p>	<p>Jumlah putus sekolah pada tingkat &amp; jenjang SMP di bagi jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya di kali 100%</p> <p>Jumlah lulusan pada jenjang SMP /MTsX di bagi Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya di kali 100 %</p> <p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs di bagi 100% Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C seluruhnya di bagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun di kali 100%</p> <p>Jumlah siswa di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C usia 16-18 tahun di bagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun dikali 100%</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/paket C</p> <p>Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C</p> <p>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK</p> <p>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</p> <p>Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap</p> <p>Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk</p> <p>Rasio lapangan olah raga per 1000 penduduk</p>	<p>Jumlah putus sekolah pada tingkat &amp; jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya di kali 100%</p> <p>Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA di bagi Jumlah siswa pada tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun ajaran sebelumnya di kali 100%</p> <p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA di bagi Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dikali 100%</p> <p>Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV di bagi Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs/SMA/SMK/MA di kali 100%</p> <p>100% siswa memiliki buku lengkap per mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs/SMA/SMK/MA</p> <p>jumlah gelanggang/balai remaja di wilayah provinsi dibagi jumlah penduduk dikali 100%</p> <p>Jumlah lapangan olah raga di wilayah provinsi di bagi jumlah penduduk di kali 100%</p>		

1	2	3	4	5
2.	Kesehatan	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan prenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam satu tahun di kali 100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%	
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan atau Tenaga	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan berkompeten di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%	
		Cakupan Pelayanan ibu nifas	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah sasaran ibu nifas di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu di bagi 15% jumlah sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%	
		Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi yang memperoleh 4x pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah seluruh bayi disatu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%	

1	2	3	4	5
	<p>Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</p> <p>Cakupan pelayanan anak balita</p> <p>Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan</p> <p>Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan</p> <p>Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat</p> <p>Cakupan Peserta KB Aktif</p>	<p>Jumlah desa/kelurahan UCI di bagi jumlah seluruh desa/kelurahan</p> <p>Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada waktu tertentu di bagi 100 % jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%</p> <p>Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping - ASI di bagi 100%</p> <p>Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin</p> <p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah murid SD dan setingkatdi satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah peserta KB aktif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%</p>	<p>Jumlah desa/kelurahan UCI di bagi jumlah seluruh desa/kelurahan</p> <p>Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada waktu tertentu di bagi 100 % jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%</p> <p>Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping - ASI di bagi 100%</p> <p>Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin</p> <p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah murid SD dan setingkatdi satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah peserta KB aktif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%</p>	<p>Jumlah desa/kelurahan UCI di bagi jumlah seluruh desa/kelurahan</p> <p>Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada waktu tertentu di bagi 100 % jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%</p> <p>Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping - ASI di bagi 100%</p> <p>Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin</p> <p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah murid SD dan setingkatdi satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah peserta KB aktif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di bagi 100% Jumlah seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam 1 tahun di kali 100%</p>

1	2	3	4	5
	<p>Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk &lt; 15 tahun</p> <p>Penemuan penderita pneumonia Balita</p> <p>Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif</p> <p>Penderita DBD yang ditangani</p> <p>Penemuan Penderita Diare</p>	<p>Jumlah kasus AFP non polio yang di laporkan di bagi Jumlah penduduk &lt; 15 tahun di kali 100%</p> <p>Jumlah penderita pneumonia balita yang di tangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah pasien baru TB BTA positif yang di temukan dan di obati dalam satu wilayah selama satu tahun di bagi 100% Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun di kali 100%</p> <p>Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun di bagi 100%</p> <p>Jumlah penderita DBD ang ditemukan dai satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun di kali 100% Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare di kali jumlah penduduk di kali 100%</p>		

1	2	3	4	5
		<p>Cakupan Pelayanan kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin</p> <p>Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin</p> <p>Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus di Berikan Sarana</p> <p>Cakupan Desa / Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan</p> <p>Cakupan Desa Siaga Aktif</p>	<p>Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 di bagi 100% Jumlah seluruh miskin di kab/kota di kali 100%</p> <p>Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan srata 3 di bagi 100% Jumlah masyarakat miskin di kali 100%</p> <p>Pelayanan gawat darurat level 1 di bagi Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota di kali 100%</p> <p>Jumlah KLB Desa/Kelurahan yang ditangani &lt;24 jam dalam periode tertentu di bagi Jumlah KLB di desa/Kelurahan yang terjadi pada periode yang sama di kali 100%</p> <p>Jumlah Desa Siaga yang aktif di bagi Jumlah Desa Siaga yang dibentuk di kali 100%</p>	
3	Peningkatan Infrastruktur	<p>Proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik</p> <p>Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk</p> <p>Jumlah jembatan dengan kondisi baik terpelihara setiap tahun</p>	<p>Jumlah panjang jalan kondisi baik/hotmik (Km) dibagi 100% panjang jalan keseluruhan (km) dikali 100%</p> <p>Adalah panjang jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yang tersedia dalam kondisi baik. Untuk menghitung capaian adalah membandingkan antara panjang jalan penghubung yang tersedia dengan kebutuhan</p> <p>Adalah Jumlah unit jembatan dalam kondisi baik sesuai standar PU untuk menghitung capaian adalah membandingkan jembatan kondisi baik dengan seluruh jembatan yang ada</p>	Dinas Pekerja Umum

1	2	3	4	5
		<p>Proporsi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air</p> <p>Persentase rumah layak huni</p> <p>Rumah tangga pengguna air bersih</p> <p>Rumah tangga pengguna listrik</p> <p>Rumah ber-IMB</p> <p>Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Ltr</p> <p>Cakupan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada</p>	<p>adalah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km) di bagi 100% panjang seluruh jalan Kabupaten (Km) di kali 100%</p> <p>adalah jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah seluruh rumah di kali 100%</p> <p>adalah jumlah rumah tangga pengguna air bersih di bagi Jumlah seluruh rumah tangga di kali 100%</p> <p>Adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik di bagi dengan jumlah seluruh rumah tangga di kali 100%</p> <p>Adalah jumlah ber-IMB di bagi dengan jumlah seluruh rumah di kali 100%</p> <p>Adalah jumlah mobil damkar di bagi Jumlah wilayah manajemen kebakaran di kali 100%</p> <p>pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian</p>	
4.	<p>Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan sosial</p>	<p>% Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB</p> <p>Pertumbuhan Industri secara Keseluruhan</p>	<p>Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri (Rp.) di Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri (Rp.) di kali 100%</p> <p>Jumlah Industri 08- Jumlah Industri Tahun 2007 di bagi Jumlah Industri s/d Tahun 2007 di kali 100%</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>

1	2	3	4	5
	<p data-bbox="194 1380 265 1814">% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</p> <p data-bbox="310 1380 348 1814">Eksport Bersih Perdagangan</p> <p data-bbox="414 1355 485 1814">Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan direvitalisasi</p> <p data-bbox="551 1405 622 1814">Jumlah pasar khusus yang dibangun</p> <p data-bbox="667 1480 738 1814">Jumlah UTTP yang di monitoring/diawasi</p> <p data-bbox="783 1330 887 1814">Frekuensi monitoring harga - harga 9 (sembilan) bahan pokok dan barang penting lainnya</p> <p data-bbox="964 1330 1068 1814">Frekuensi pelaksanaan pameran prooduk eksport di tingkat nasional</p> <p data-bbox="1113 1405 1184 1814">Frekuensi monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP</p> <p data-bbox="1262 1455 1333 1814">Jumlah Inkubator yang terbentuk</p>		<p data-bbox="183 458 254 1308">Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (Rp) di bagi Jumlah total PDRB di kali 100%</p> <p data-bbox="303 458 375 1308">Nilai Eksport bersih sama dengan nilai eksport di kurangi nilai import di kali 100%</p> <p data-bbox="414 483 518 1308">Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan direvitalisasi (Rp) di bagi Jumlah Keseluruhan Pasar di kali 100%</p> <p data-bbox="551 483 622 1308">Jumlah pasar khusus yang dibangun (Rp) di bagi 100% Jumlah Keseluruhan pasar di kali 100%</p> <p data-bbox="667 458 738 1308">Jumlah UTTP yang dimonitoring/diawasi di bagi Jumlah Keseluruhan UTTP yang ada di kali 100%</p> <p data-bbox="783 483 887 1308">Frekuensi monitoring harga - harga 9 (sembilan) bahan pokok dan barang penting lainnya di bagi Jumlah Keseluruhan bahan Pokok di kali 100%</p> <p data-bbox="964 533 1068 1308">Frekuensi pelaksanaan pameran produk eksport di tingkat nasional di bagi 100% Jumlah Keseluruhan Produk Eksport yang ada di kali 100%</p> <p data-bbox="1113 458 1217 1308">Frekuensi monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP di bagi 100% Jumlah semua pengusaha yang memiliki SIUP dan TDP di kali 100%</p> <p data-bbox="1262 458 1333 1308">Jumlah Inkubator yang terbentuk di bagi 100% Jumlah Inkubator yang ada di kali 100%</p>	

1	2	3	4	5
		<p>Jumlah perajin IKM mendapatkan bantuan peralatan tepat guna</p> <p>Jumlah Pengusaha Muda yang dibina</p> <p>Jumlah petugas pungut yang telah diberikan biaya operasional</p> <p>Jumlah Program Dekranasda yang dilaksanakan</p> <p>Frekuensi Kepedulian terhadap IKM</p> <p>Jumlah buku Indag dalam angka Kab.bangli yang tersusun</p> <p>Jumlah petugas pengelola pasar tradisional yang dibina</p>	<p>Jumlah perajin IKM yang mendapatkan bantuan peralatan tepat guna di bagi 100% Jumlah Perajin yang ada di kali 100%</p> <p>Jumlah Pengusaha Muda yang dibina di bagi Jumlah Pengusaha Muda yang ada di kali 100%</p> <p>Jumlah petugas pungut yang telah diberikan biaya operasional di bagi Jumlah Keseluruhan Petugas Pungut di kali 100%</p> <p>Jumlah Program Dekranasda yang di laksanakan di bagi Jumlah Keseluruhan Perajin di kali 100%</p> <p>Frekuensi Kepedulian terhadap IKM di bagi Jumlah Keseluruhan IKM di kali 100%</p> <p>Jumlah buku Indag dalam angka kab.Bangli yang tersusun di bagi Jumlah Keseluruhan Perajin di kali 100%</p> <p>Jumlah Petugas Pengelola Pasar Tradisional yang dibina di bagi Jumlah Keseluruhan Petugas Pengelola Pasar yang ada di kali 100%</p>	
5.	<p>Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>Persentase Jumlah Panti Asuhan</p> <p>Persentase Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni KK Miskin</p>	<p>Jumlah panti asuhan yang aktif di bagi Jumlah panti yang ada di kali 100%</p> <p>Jumlah KK RTLH di berikan Bantuan Bedah Rumah di bagi Jumlah KK Miskin RTLH di kali 100%</p>	<p>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>

1	2	3	4	5
		<p>Angka Tenaga yang ditempatkan di perusahaan</p> <p>Angka Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>Persentase Bantuan KUBE-Fakir Miskin (FM) Aktif</p> <p>Persentase Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Persentase Bantuan Sosial bagi Korban Bencana</p> <p>Persentase Karang Taruna Aktif</p> <p>Persentase PSM dan TKSK Aktif</p> <p>Persentase tertanganinya Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (PKH)</p>	<p>Jumlah KUBE Aktif di bagi 100% Jumlah KUBE di kali 100%</p> <p>Jumlah KUBE Aktif di bagi Jumlah KUBE di kali 100%</p> <p>Jumlah Korban Bencana di Evakuasi di bagi Jumlah Korban Bencana di kali 100%</p> <p>Jumlah KK Penerima Bantuan Sosial Korban Bencana di bagi Jumlah KK Korban Bencana di kali 100%</p> <p>Jumlah Karang Taruna yang menerima Bintek di bagi Jumlah Karang Taruna di kali 100%</p> <p>Jumlah PSM dan TKSK yang Aktif di kali Jumlah PSM dan TKSK di kali 100%</p> <p>Jumlah KSM yang Menerima Bantuan PKH di bagi Jumlah KSM di kali 100%</p>	

1	2	3	4	5
		<p>Persentase Anak Terlantar yang ditangani melalui Pelayanan Dalam Panti dan Luar Panti</p> <p>Persentase Anak Berhadapan dengan Hukum yang perlu mendapatkan perlindungan pendampingan dan Advokasi</p> <p>Persentase Lanjut Usia terlantar yang mendapat pelayanan dalam dan luar panti</p> <p>Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dalam dan luar panti sesuai standar pelayanan minimal</p> <p>Pemulangan Gelandangan dan Pengemis.</p> <p>Jumlah orang terlantar yang perlu difasilitasi dan dipulangkan,</p> <p>Persentase jenazah terlantar yang dilaporkan dan perlu dikremasi / dikuburkan / diupacara</p>	<p>Jumlah AT yang Ditangani di bagi Jumlah AT di kali 100%</p> <p>Jumlah ABH yang di tangani di bagi Jumlah ABH di kali 100%</p> <p>Jumlah LU Terlantar yang ditangani di bagi Jumlah LU terlantar di kali 100%</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas yang ditangani di bagi Jumlah Penyandang Disabilitas di kali 100%</p> <p>Jumlah Gepeng yang dipulangkan di bagi 100% Jumlah Gepeng yang dirazia di kali 100%</p> <p>Jumlah orang terlantar yang difasilitasi di bagi Jumlah orang terlantar di bagi 100%</p> <p>Jumlah Jenazah Terlantar yang ditangani di bagi Jumlah Jenazah Terlantar di kali 100%</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Persentase orang dengan HIV dan AIDS (ODHA/ADHA) yang dianggap mampu melakukan fungsi sosialnya di masyarakat</p> <p>Persentase Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berpartisipasi dalam menangani keluarga bermasalah sosial psikologis</p> <p>Persentase perusahaan melaksanakan UMK</p> <p>Persentase perusahaan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>Persentase perusahaan memiliki peraturan perusahaan</p> <p>Persentase Pemberangkatan Transmigrasi</p> <p>Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Persentase Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>Jumlah ODHA yang Melakukan Fungsi Sosial di bagi 100% Jumlah ODHA di kali 100%</p> <p>Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang di tangani di bagi 100% Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di kali 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK di bagi 100% Jumlah Perusahaan di kali 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan yang memberikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di bagi 100% Jumlah Perusahaan di kali 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan di bagi Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan Minimal 10 orang tenga kerja di kali 100%</p> <p>Jumlah KK yang Terkirim di bagi Jumlah KK yang mendapat di kali 100%</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di bagi Jumlah Tenaga Kerja yang di latih di kali 100%</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja ditempatkan di bagi Jumlah Tenaga Kerja Pencari Kerja di kali 100%</p>		

1	2	3	4	5
		<p>Persentase Padat Karya</p> <p>Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)</p> <p>Peningkatan Kualitas Tenaga Siap Pakai</p> <p>Persentase Peningkatan Kualitas LPK</p>	<p>Jumlah Tenaga Kerja yang direkrut di bagi Jumlah Penduduk Miskin/Setengah Pengangguran di kali 100%</p> <p>Jumlah Kelompok yang Dilatih di bagi Jumlah Kelompok Berbasis Kewirausahaan di kali 100%</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang di Latih di bagi Jumlah Terdaftar Berbasis Kompetensi/Masyarakat di kali 100%</p> <p>LPK Terakreditasi di bagi Jumlah LPK di kali 100%</p>	
6.	Lingkungan hidup, Tata ruang dan penanggulangan bencana	<p>Jumlah sampah yang terangkut</p> <p>Jumlah taman yang terpelihara</p> <p>Luas wilayah penyapuan</p> <p>Jumlah lampu yang terpelihara</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana kebersihan</p>	<p>Jumlah sampah yang terangkut ke TPA di bagi Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Bangli di kali 100%</p> <p>Jumlah taman yang terpelihara di bagi Jumlah Taman di kali 100%</p> <p>Luas wilayah pelayanan pengelolaan sampah di bagi Luas wilayah administrasi perkotaan di kali 100%</p> <p>Jumlah titik lampu yang di pelihara di bagi Jumlah titik lampu yang ada di Kota di kali 100%</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara di bagi Jumlah sarana dan prasarana yang ada di kali 100%</p>	Dinas Tata Kota, dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal

1	2	3	4	5
		<p>Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas ber HPL/HGB</p> <p>Pengendalian potensi sumber pencemaran air</p> <p>Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL/UPL</p> <p>Sampling pemantauan kualitas air, sungai dan/atau danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau.</p>	<p>Luas ruang terbuka hijau di bagi Luas wilayah ber HPL/HGB di kali 100%</p> <p>Jumlah beban pencemaran air yang telah dikendalikan di bagi jumlah beban pencemaran air yang dihasilkan dikali 100%</p> <p>Jumlah perush. Wajib amdal/UKL/UPL yang telah diawasi di bagi jumlah seluruh perusahaan wajib amdal/UKL/UPL di kali 100%</p> <p>Jumlah titik pengambilan sampling dibagi jumlah titik pemantauan rutin yang ditetapkan dikali 100%</p>	Badan Lingkungan Hidup
7.	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi yang kreatif berdaya saing dan produktif	<p>Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan (%)</p> <p>Persentase Peningkatan produksi Hortikultura (%)</p> <p>Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan</p> <p>Persentase Berkurangnya Lahan Kritis</p>	<p>Produksi tanaman pangan Tahun n - (Tahun n-1) di bagi Produksi tanaman pangan Tahun n - (Tahun n-1) di kali 100%</p> <p>Produksi Hortikultura Tahun n - (Tahun n-1) di bagi Produksi Hortikultura (Tahun n-1) di kali 100%</p> <p>Produksi Perkebunan Tahun n - (Tahun n-1) di bagi Produksi Perkebunan (Tahun n-1) di bagi 100%</p> <p>Luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi di bagi Luas hutan total dan lahan Kritis (Ha) di kali 100%</p>	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

1	2	3	4	5
		<p>Peningkatan mutu hasil produksi perikanan</p> <p>Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular</p> <p>Peningkatan Peternakan Unggulan Daerah</p> <p>Persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi</p> <p>Persentase usaha mikro dan kecil</p> <p>Jumlah penanganan daerah rawan pangan</p> <p>Jumlah pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok</p> <p>Jumlah kelompok lumbung pangan menerima kegiatan cadangan pangan daerah</p> <p>Jumlah kelompok lumbung pangan yang terbangun pada tahun berkenan</p>	<p>Jumlah hasil budidaya ikan dan hasil penangkapan ikan</p> <p>Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular</p> <p>Jumlah Peternakan Unggulan Daerah</p> <p>Jumlah koperasi aktif di bagi jumlah seluruh koperasi di kali 100%</p> <p>Jumlah usaha mikro dan kecil di bagi jumlah seluruh UKM di kali 100%</p> <p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p>	<p>Dinas Peternakan dan Perikanan Darat</p> <p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <p>Kantor Ketahanan Pangan</p>

1	2	3	4	5
		Jumlah sekor pola pangan harapan	ada/tidak	
8.	Meningkatnya peranan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pembangunan pariwisata sebagai wahana pelestarian budaya dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	<p>Jumlah kunjungan Wisatawan</p> <p>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</p> <p>Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya</p> <p>Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya</p> <p>Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</p>	<p>Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun</p> <p>Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata di bagi Jumlah total PDRB di kali 100%</p> <p>Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya</p> <p>Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya</p> <p>Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ( 6 buah) di bagi total benda, situs dan kawasan yang dimiliki Daerah (2.078 buah)</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9.	Meningkatnya penegakan hukum yang mampu menghasilkan keputusan yang adil dan dapat mengayomi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	<p>Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban</p> <p>Persentase pelanggaran Perda dan Perbup tentang penyelenggaraan reklame yang tertangani</p> <p>Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima</p>	<p>Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun berkenan</p> <p>Persentase pelanggaran Perda dan Perbup tentang penyelenggaraan reklame yang tertangani pada tahun berkenan</p> <p>Jumlah laporan pelanggaran yang diselesaikan dalam kurun waktu 1 hari setelah laporan diterima di bagi 100% Jumlah pelanggaran di kali 100%</p>	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5
		<p>Persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani dalam jangka waktu 1 hari</p> <p>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</p> <p>Persentase kejadian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani</p>	<p>Jumlah pelanggaran penyakit masyarakat yang diselesaikan di bagi Jumlah pelanggaran penyakit masyarakat di kali 100%</p> <p>Jumlah Polisi Pamong Praja di bagi Jumlah Peduduk x 10.000 di kali 100%</p> <p>Jumlah kejadian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani</p>	
10.	<p>Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, demokratis, jujur, transparan, dan akuntabel</p>	<p>Rata-rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin</p> <p>Persentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP</p> <p>Meningkatnya kualitas layanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan e-governance</p> <p>Persentase Penanganan Pengaduan terkait perizinan</p> <p>Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non izin yang diterbitkan di bagi jumlah izin dan non izin yang diterbitkan di kali 100%</p> <p>Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP</p> <p>Jumlah masyarakat yang mengakses informasi secara online (Website)</p> <p>Jumlah pengaduan yang ditangani di bagi 100% Jumlah pengaduan yang masuk di kali 100%</p> <p>Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan</p>	Kantor Pelayanan Perizinan

1	2	3	4	5
	<p>Penerimaan CPNS</p> <p>Bezeting Pegawai</p> <p>Seleksi Penerimaan Penerimaan CPNS</p> <p>Persentase Pegawai struktural yang mengikuti Diklat PIM IV,III dan II</p> <p>Persentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai</p> <p>Persentase pegawai yang tidak melakukan tindak pidana</p> <p>Persentase peserta ujian lulus ujian Dinas Tk. I dan II</p> <p>Peserta CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan</p> <p>Persentase pegawai yang mengajukan ijin belajar</p>	<p>Jumlah kebutuhan di bagi Realisasi di kali 100%</p> <p>Jumlah Kebutuhan di bagi Pegawai yang ada di kali 100%</p> <p>Jumlah pendaftar di bagi lulus administrasi di kali 100%</p> <p>Pegabat struktural yang ikut dan lulus Diklat PIM di bagi 100% Pejabat struktural yang ada di kali 100%</p> <p>pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai di bagi 100% Jumlah seluruh pegawai di kali 100%</p> <p>Pegawai yang tidak melakukan tindak pidana di bagi 100% Jumlah seluruh pegawai di kali 100%</p> <p>Jumlah peserta yang lulus ujian Dinas di bagi 100%</p> <p>Jumlah peserta ujian Dinas di kali 100%</p> <p>Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan di bagi Jumlah CPNS keseluruhan di kali 100%</p> <p>Jumlah ijin belajar yang keluar di bagi Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar di kali 100%</p>	<p>Badan Kepegawaian Daerah</p>	

1	2	3	4	5
		<p>Persentase pegawai yang mengajukan rekomendasi tugas belajar</p> <p>Presentase pegawai yang mengajukan ijin percearaan</p> <p>Penyelenggaraan Kenaikan pangkat bagi PNS fungsional dan struktural</p> <p>Penyelenggaraan usul pensiun PNS</p> <p>Penyelenggaraan ujian penyelesaian Ijazah</p> <p>Dokumen Perencanaan (RKPD) yang ditetapkan dengan PERKADA</p> <p>Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD</p> <p>Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan</p> <p>Jumlah Buku Profil Daerah yang disusun</p>	<p>Jumlah rekomendasi tugas belajar yang keluar di bagi Jumlah PNS yang mengajukan tugas belajar di kali 100%</p> <p>Rekomendasi ijin percearaan yang keluar di bagi PNS yang mengajukan ijin percearaan di kali 100%</p> <p>Jumlah SK yang terbit di bagi 100% Jumlah usul di kali 100%</p> <p>Jumlah SK yang terbit di bagi 100% Jumlah usul di kali 100%</p> <p>Jumlah realisasi di bagi 100% Jumlah usul di kali 100%</p> <p>ada/tidak</p> <p>Jumlah program RKPD tahun berkenan di bagi 100%</p> <p>Jumlah Progra RPJMD tahun berkenan</p> <p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal</p>

1	2	3	4	5
		<p>Dokumen PDRB Kabupaten (IKK)</p> <p>Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM)</p> <p>Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)</p> <p>Opini Pemeriksaan BPK</p> <p>Pengawasan Internal berkala</p> <p>Monitoring / Evaluasi dan tindak lanjut temuan pengawasan</p>	<p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p> <p>WTP</p> <p>ada/tidak</p> <p>ada/tidak</p>	<p>Inspektorat</p>

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA